

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang

Masyarakat umum sudah menggunakan istilah "gender" baik dalam tulisan maupun forum untuk membedakan antara perempuan dan laki-laki. Gender didefinisikan sebagai konstruksi sosialkultural yang membedakan sifat *masculinitas* dan *feminitas*. Gender berbeda dari *sex* dan jenis kelamin biologis laki-laki dan perempuan. Para ahli menggunakan istilah "gender" untuk menggambarkan perbedaan antara perempuan dan laki-laki yang disebabkan oleh sifat bawaan sosial dan biologi (Huda, 2020).

Selain tingkat pertumbuhan ekonomi yang tinggi, keberhasilan pembangunan suatu negara juga diukur melalui kualitas manusianya. Dalam model pembangunan Indonesia, yang tercermin dalam Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, pembangunan manusia adalah tujuan utama. Dalam laporan "*Global Human Development Report*" yang diterbitkan oleh Program Pembangunan Dunia (UNDP) pada tahun 1990, konsep "Pembangunan Manusia" muncul sebagai model pembangunan yang berbeda (BPS, 2011).

UNDP memperkenalkan Indeks Pembangunan Gender (IPG) pertama kali pada tahun 1995, lima tahun setelah UNDP memperkenalkan Indeks Pembangunan Manusia (IPM). UNDP menggunakan pendekatan yang sama hingga tahun 2009. Dalam metode lama IPG tidak menghitung ketimpangan antar gender secara langsung. Sebaliknya, itu hanya menghitung perbedaan masing-masing komponen

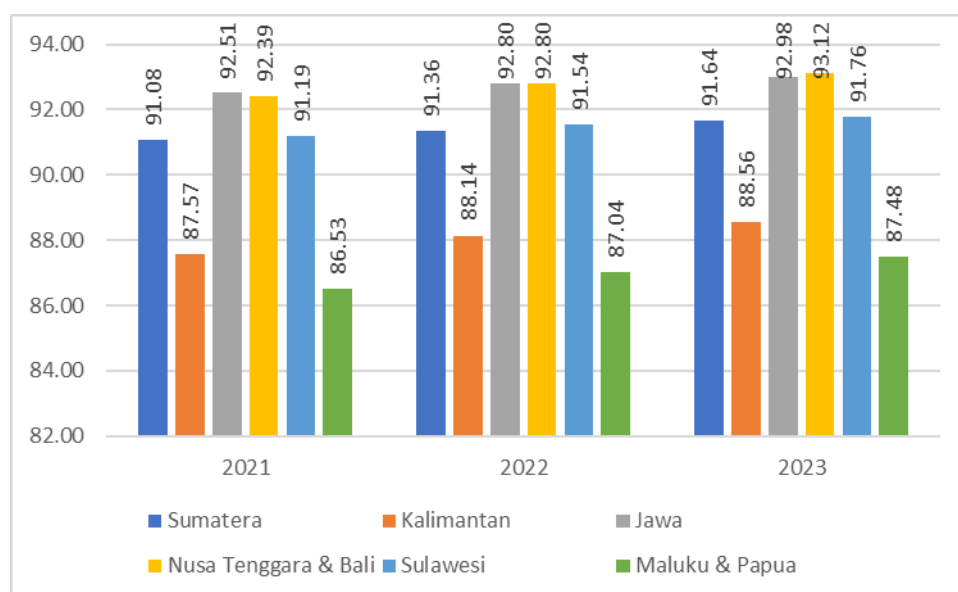
IPM untuk masing-masing jenis kelamin. Selain itu, UNDP menghentikan penghitungan IPG mulai tahun 2010 hingga 2013 karena angka IPG tidak dapat diinterpretasikan secara terpisah dari IPM. Pada tahun 2014, UNDP kembali menggunakan metode baru untuk menghitung IPG, yang merupakan penyempurnaan dari metode sebelumnya dan pengukuran langsung terhadap ketimpangan antar gender dalam masyarakat (BPS, 2024).

Salah satu alat penting untuk mengukur kesetaraan gender dalam pembangunan manusia di Indonesia adalah Indeks Pembangunan Gender (IPG). IPG menghitung perbedaan rasio dalam pencapaian pembangunan manusia antara perempuan dan laki-laki dengan mempertimbangkan aspek kesehatan, pendidikan, dan ekonomi (Elisa & Helma, 2022). Terlepas dari tren peningkatan IPG Indonesia dari 90,34 pada tahun 2014 menjadi 91,85 pada tahun 2023, kesenjangan gender masih ada. Misalnya, pada tahun 2020 IPG Indonesia sebesar 91,06 turun dari tahun sebelumnya dan belum mencapai target 91,21 yang ditetapkan dalam Rencana Strategis Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Kemen PPPA) (Aprilianti & Setiadi, 2022). Hal ini menunjukkan bahwa perempuan masih menghadapi masalah dalam mendapatkan pendidikan, perawatan kesehatan, dan uang, meskipun ada kemajuan.

Indeks Pembangunan Gender (IPG) memiliki peran penting dalam menunjukkan kesetaraan gender di bidang kesehatan, pendidikan, dan ekonomi. Peningkatan indeks menunjukkan bahwa perempuan memiliki akses yang lebih setara, yang mendorong peningkatan ekonomi inklusif dan penurunan kemiskinan melalui partisipasi aktif mereka. IPG bukan sekadar alat ukur tetapi juga strategi

penting untuk pembangunan berkelanjutan yang adil di Indonesia. Ini juga menjadi acuan dalam pembagian Dana Alokasi Daerah (DID) dan kebijakan daerah yang responsif gender (Salam & Wahab, 2023).

Diketahui bahwa Indonesia memiliki 6 pulau besar yaitu Pulau Sumatera, Kalimantan, Jawa, Nusa Tenggara dan Bali, Sulawesi, Maluku dan Papua. Capaian indeks pembangunan gender di tiap-tiap pulau mempunyai perbedaan. Secara nasional indeks pembangunan gender di Indonesia pada tahun 2023 mencapai angka 91,85 meningkat sebesar 0,22 persen dari 91,63 pada tahun 2022. IPM laki-laki pada tahun 2023 lebih besar dari IPM Perempuan dengan angka 77,26 dan 70,96. Berikut data perkembangan IPG tiap pulau di Indonesia tahun 2021-2023.



Sumber: Badan Pusat Statistik (diolah), 2025

**Gambar 1.1 Data IPG Indonesia Tahun 2021-2023 (Persen)**

Dilihat dari gambar 1.1 setiap tahunnya indeks pembangunan gender di tiap-tiap pulau mengalami perkembangan yang cenderung naik. IPG tertinggi berada pada tahun 2023, Pulau Nusa Tenggara dan Bali merupakan pulau dengan IPG

tertinggi sebesar 93,12 persen. Dalam tiga tahun terakhir Pulau Nusa Tenggara dan Bali mempunyai rata-rata IPG sebesar 92,77 persen. Persentase yang tinggi dikarenakan umur harapan hidup perempuan lebih tinggi dibandingkan laki-laki. Di Bali, misalnya, umur harapan hidup perempuan 77,64 tahun, sedangkan umur harapan hidup laki-laki 72,25 tahun pada tahun 2023. Serta tingginya tingkat partisipasi pendidikan yang lebih tinggi pada perempuan, seperti angka harapan lama sekolah dan rata-rata lama sekolah, sebanding atau lebih tinggi dibandingkan laki-laki menjadi faktor meningkatnya IPG. Pulau Maluku dan Papua merupakan pulau dengan nilai IPG terendah di tahun 2023 dengan nilai 87,48 persen dengan rata-rata 87,01 persen. Rendahnya nilai IPG dikarenakan masih terbatasnya fasilitas pendidikan sehingga tingkat partisipasi pendidikan yang rendah dapat menurunkan angka IPG.

Berdasarkan data pada gambar 1.1 terlihat bahwa Pulau Maluku dan Papua memiliki angka IPG dengan nilai rata-rata sebesar 87,01 persen dari tahun 2021-2023. Hal ini menunjukkan bahwa Pulau Maluku dan Papua memiliki angka IPG terendah dibandingkan dengan pulau lainnya. Angka IPM di Pulau Maluku dan Papua pada tahun 2021-2023 mempunyai nilai rata-rata sebesar 66,78 persen. Rendahnya nilai IPG disebabkan karena angka IPM yang rendah. Kesehatan, pendidikan, dan pengeluaran per kapita merupakan indikator perhitungan IPG dan IPM.

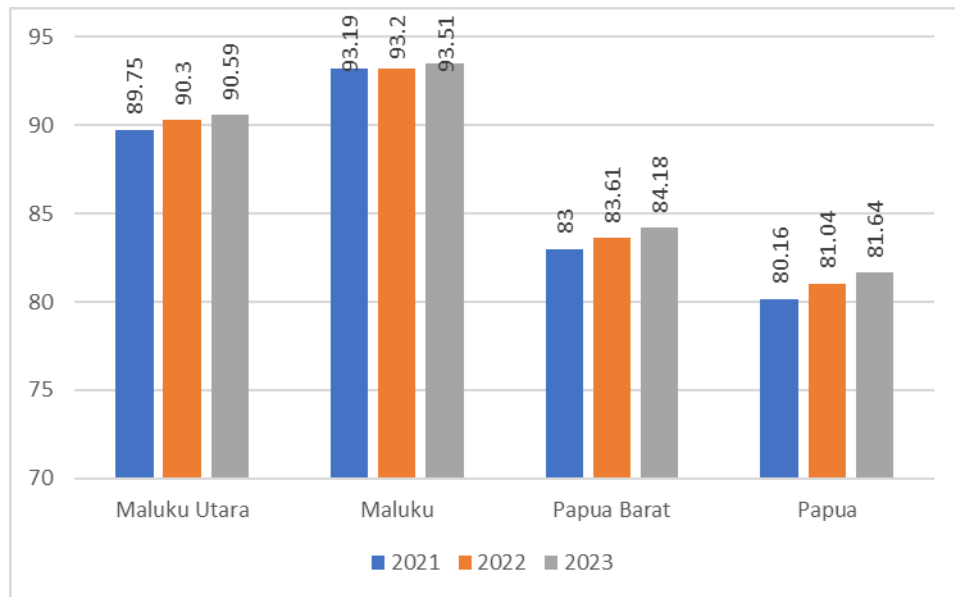
Angka kesehatan di Pulau Maluku dan Papua tahun 2021-2023 mencapai rata-rata sebesar 66,97 persen. Rendahnya angka kesehatan disebabkan oleh kondisi geografis yang terpencil, yang terdiri dari kumpulan pulau kecil dan daerah

pegunungan yang sulit diakses, menjadi tantangan utama dalam memberikan akses terhadap layanan kesehatan. Kurangnya infrastruktur seperti rumah sakit, puskesmas, dan peralatan kesehatan memperparah keadaan ini. Di samping itu, masalah gizi, seperti tingginya angka *stunting* dan malnutrisi pada anak-anak, mencerminkan kurangnya asupan makanan bergizi serta minimnya pengetahuan masyarakat mengenai pola makan yang sehat (Maluku, 2024).

Angka pendidikan di Pulau Maluku dan Papua tahun 2021-2023 memiliki rata-rata sebesar 10,78 persen, hal ini dikarenakan kondisi geografis yang sulit dijangkau, minimnya infrastruktur pendidikan termasuk sekolah, ruang kelas, laboratorium, dan sarana transportasi, selain itu kekurangan tenaga pendidik terutama di wilayah 3T (tertinggal, terdepan, dan terluar), serta faktor sosial-ekonomi seperti kemiskinan (Tutukansa & Tuffahati, 2022). Angka pengeluaran per kapita di Pulau Maluku dan Papua tahun 2021-2023 memiliki rata-rata sebesar 8,2 juta rupiah, ini disebabkan oleh beberapa hal, seperti ekonomi lokal yang bergantung pada pertanian dan perikanan, akses terbatas ke infrastruktur dan pasar, dan tingkat pendidikan dan keterampilan yang rendah mengurangi produktivitas. Pengeluaran untuk barang dan jasa lainnya sangat terbatas karena kemiskinan yang tinggi, di mana banyak orang hanya mampu memenuhi kebutuhan dasar seperti makanan. Selain itu, kondisi geografis yang sulit dan kurangnya investasi dari sektor swasta dan pemerintah dalam pengembangan infrastruktur menghambat pertumbuhan ekonomi, sehingga pengeluaran per kapita tetap rendah (PUPR, 2017).

Oleh karena itu, penelitian ini berfokus pada Pulau Maluku dan Papua dengan tujuan untuk menganalisis lebih dalam faktor-faktor yang memengaruhi indeks pembangunan gender di Pulau Maluku dan Papua. Fokus penelitian pada Pulau Maluku dan Papua diharapkan dapat memberikan pemahaman yang lebih komprehensif mengenai permasalahan pembangunan berbasis gender serta menjadi dasar penyusunan kebijakan yang lebih efektif untuk meningkatkan kualitas pembangunan manusia berbasis gender di wilayah tersebut.

Berkembangnya ekonomi tidak luput terlepas dari peran pembangunan manusia. Salah satu capaian pembangunan manusia dapat dilihat dari keseimbangan antara peran laki-laki dan perempuan. Membandingkan Indeks Pembangunan Gender (IPG) dan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) dapat menunjukkan ketidaksetaraan gender (Pamungkas & Hukom, 2024). Hal ini menunjukkan bahwa terdapat selisih antara nilai IPG dan IPM di Pulau Maluku dan Papua di tiap tahunnya. Saat nilai IPM lebih rendah dari nilai IPG yang mendekati 100, ini menandakan masih ada perbedaan antara laki-laki dan perempuan. Ketika Indeks Pembangunan Gender (IPG) mencapai 100, kesetaraan gender dapat dianggap setara. Berikut data perkembangan IPG Provinsi di Pulau Maluku dan Papua tahun 2021-2023.



Sumber: Badan Pusat Statistik (diolah), 2025

**Gambar 1.2 IPG Provinsi di Pulau Maluku & Papua**

**Tahun 2021-2023 (Persen)**

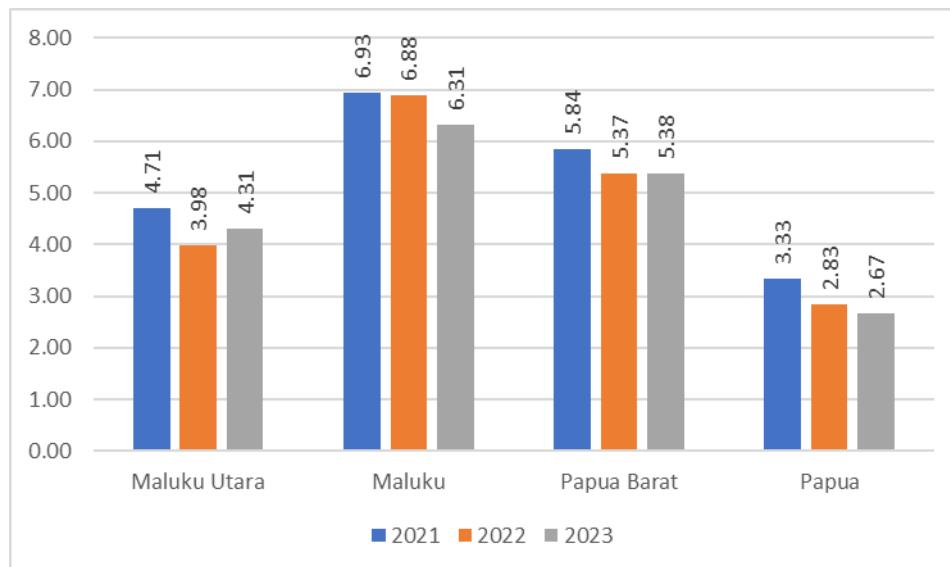
Pada gambar 1.2 di atas dapat dilihat bahwa perkembangan IPG Provinsi di Pulau Maluku dan Papua dalam tiga tahun terakhir mengalami kenaikan tiap tahunnya. Provinsi Maluku merupakan provinsi dengan nilai IPG tertinggi di Pulau Maluku dan Papua pada tahun 2021-2023 dengan rata-rata sebesar 93,30 persen selisih 3,02 persen dari IPG Maluku Utara sebesar 90,39 persen yang merupakan provinsi di Pulau Maluku. Tingginya angka Indeks Pembangunan Gender (IPG) di Provinsi Maluku dan Provinsi Maluku Utara dipengaruhi oleh kesetaraan dalam akses pendidikan dan kesehatan antara laki-laki dan perempuan, serta partisipasi aktif perempuan dalam ekonomi. Selain itu, adanya program-program pemerintah yang mendukung pemberdayaan perempuan seperti Program Pengarusutamaan Gender yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas hidup perempuan dan anak, juga berkontribusi pada peningkatan IPG (Jatti et al., 2020). Provinsi Papua

merupakan provinsi dengan angka IPG terendah pada tahun 2021-2023 dengan rata-rata sebesar 80,95 persen selisih 0,02 persen dari Provinsi Papua Barat. Rendahnya angka Indeks Pembangunan Gender (IPG) di Provinsi Papua dan Provinsi Papua barat disebabkan oleh kesenjangan akses pendidikan, partisipasi ekonomi yang rendah, dan stigma sosial yang menghambat peran perempuan. Selain itu, faktor ekonomi keluarga yang lemah dan praktik diskriminasi juga berkontribusi pada masalah ini (Annastasya, 2024).

Meskipun Pulau Maluku dan Papua merupakan pulau dengan angka IPG terendah, tetapi setiap tahunnya angka IPG mengalami kenaikan. Namun, dengan meningkatnya pembangunan manusia masih menyisakan masalah yang ada seperti pengangguran. kurangnya keterampilan atau kemampuan masyarakat dan rendahnya pendidikan menyebabkan pengangguran terjadi. Selain itu ketidaksetaraan antara laki-laki dan perempuan dalam dunia kerja menjadi salah satu faktor pemicunya. Pengangguran memiliki hubungan yang erat dengan kemiskinan. Ketika tingkat pengangguran naik maka tingkat kemiskinan juga naik, begitu pun sebaliknya. Dengan begitu akan menimbulkan ketimpangan pendapatan dan garis antara kaya dan miskin semakin besar.

Pengangguran merupakan salah satu faktor penghambat dalam IPG. Jika seseorang memiliki kemampuan yang diperlukan, peluang untuk mendapatkan pekerjaan yang menguntungkan akan meningkat. Orang yang bekerja dapat menghasilkan pendapatan untuk dirinya sendiri, dan semakin tinggi pendapatannya, semakin besar daya belinya. Untuk seseorang dengan kemampuan yang rendah, akan sulit untuk menemukan pekerjaan yang cocok baginya karena masih ada orang

yang belum bekerja atau sedang mencari pekerjaan. Ini dapat diukur dengan menggunakan indikator Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT). Berikut data Tingkat Pengangguran Terbuka Provinsi di Pulau Maluku tahun 2021-2023.



Sumber: Badan Pusat Statistik (diolah), 2025

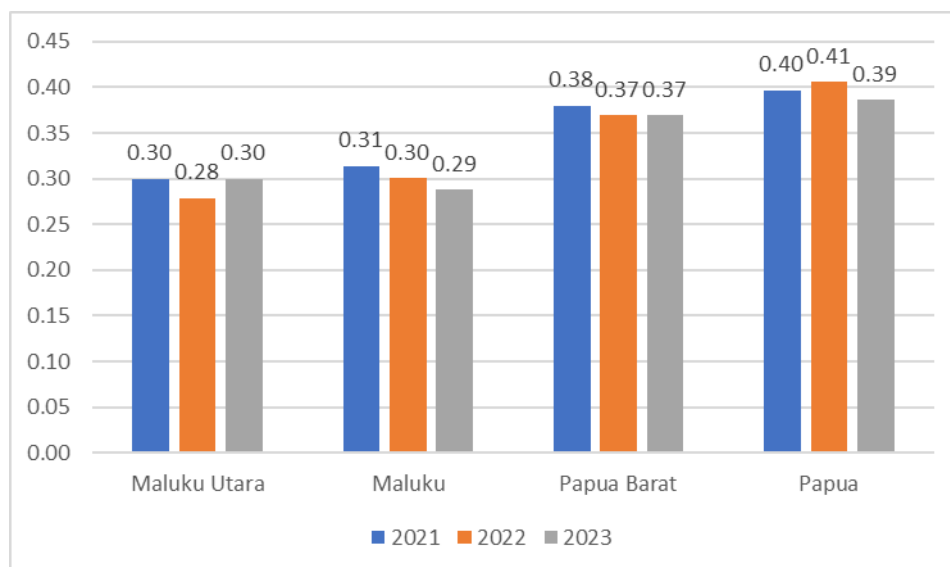
**Gambar 1.3 TPT Provinsi di Pulau Maluku & Papua  
Tahun 2021-2023 (Persen)**

Dilihat dari gambar 1.3 Provinsi Maluku merupakan provinsi dengan angka pengangguran tertinggi pada tahun 2021-2023 dengan rata-rata sebesar 6,71 persen selisih 1,18 persen dari Provinsi Papua Barat sebesar 5,53 persen. Provinsi Maluku Utara memiliki angka pengangguran dengan rata-rata sebesar 4,33 persen. Sedangkan Provinsi Papua merupakan provinsi dengan angka pengangguran terendah pada tahun 2021-2023 dengan rata-rata sebesar 2,94 persen. Tingginya tingkat pengangguran terjadi pada tahun 2021 dikarenakan terjadinya pandemi *Covid-19* yang terjadi di Indonesia.

Pandemi Covid-19 sangat berdampak kepada seluruh aspek perekonomian, salah satunya pengurangan tenaga kerja atau PHK. Banyak perusahaan atau pelaku ekonomi yang melakukan PHK massal, yang di mana dampak dari itu mengakibatkan naiknya tingkat pengangguran. Pandemi juga berdampak terhadap menurunnya tingkat produktivitas masyarakat yang disebabkan oleh PHK. Namun di Provinsi Papua Covid-19 tidak begitu berpengaruh terhadap pengangguran di Provinsi Papua. Ini dikarenakan karena lokasi jarak antara kota atau desa yang saling berjauhan dan akses jalan yang kurang memadai. Serta sebagian besar penduduk Papua tinggal di perdesaan dengan TPT yang lebih rendah dibandingkan perkotaan, di mana mereka cenderung bekerja di sektor informal seperti pertanian yang relatif tidak terlalu terdampak pandemi. Selain itu struktur ekonomi Papua yang didominasi oleh sektor pertambangan dan penggalian tetap beroperasi selama pandemi, sehingga memberikan kontribusi besar terhadap stabilitas kesempatan kerja (Iek, 2020). Angka pengangguran yang tinggi di Provinsi Maluku dapat disebabkan oleh keterbatasan lapangan kerja dan infrastruktur yang kurang memadai, meskipun ketimpangan pendapatan rendah menunjukkan distribusi pendapatan yang lebih merata. Hal ini mungkin mencerminkan adanya dukungan sosial atau program pemerintah yang membantu mengurangi kesenjangan ekonomi.

Selanjutnya *Gini Ratio* merupakan salah satu faktor yang menghambat meningkatnya IPG. Menurut Todaro dalam (Rustariyuni, 2014), distribusi pendapatan ialah penyebaran pendapatan atau perbedaan pendapatan yang dihasilkan masyarakat. Distribusi pendapatan menunjukkan ketidaksamaan dalam hasil pembangunan suatu wilayah atau negara, baik yang diterima secara individu

maupun berdasarkan kepemilikan faktor-faktor produksi di kalangan penduduknya. Di negara-negara yang berkembang ketimpangan pendapatan lebih besar, sedangkan di negara-negara yang lebih maju, ketimpangan pendapatan lebih rendah. Untuk mengukur ketimpangan pendapatan dapat menggunakan gini rasio. Indeks gini bernilai 0 (kemerataan sempurna) sampai dengan 1 (ketimpangan sempurna). ketimpangan pendapatan dapat menjadi penghambat utama dalam meningkatkan kesejahteraan manusia. Berikut data perkembangan *Gini Ratio* Provinsi di Pulau Maluku dan Papua tahun 2021-2023.



Sumber: Badan Pusat Statistik (diolah), 2025

**Gambar 1.4 Gini Rasio Provinsi di Pulau Maluku & Papua  
Tahun 2021-2023 (Poin)**

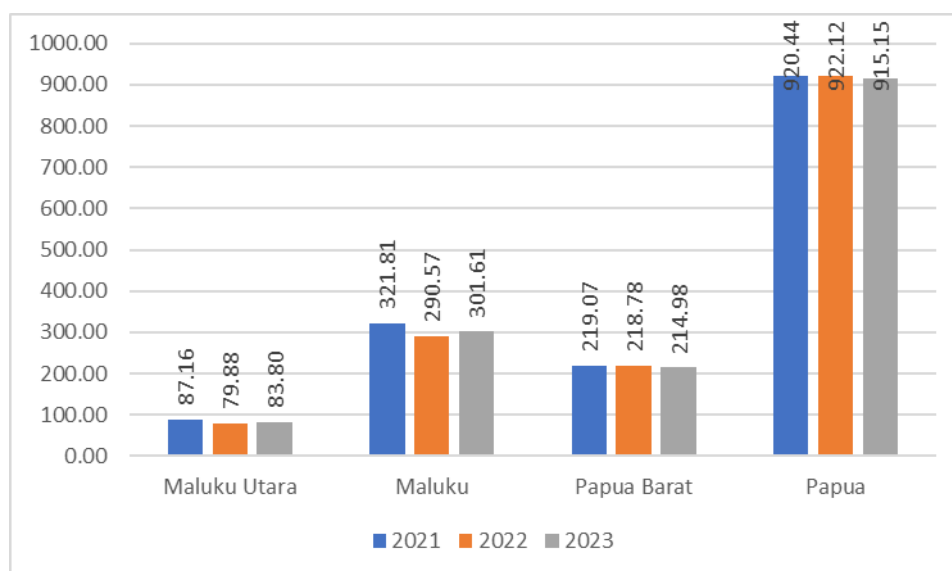
Dilihat pada gambar 1.4 di atas Provinsi Papua merupakan provinsi dengan angka gini rasio tertinggi pada tahun 2021-2023 dengan rata-rata sebesar 0,40 selisih 0,03 poin dengan Provinsi Papua Barat dengan rata-rata 0,37. Tingginya angka *gini ratio* di Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat dipengaruhi oleh

beberapa faktor, termasuk ketimpangan distribusi pendapatan, pertumbuhan ekonomi yang tidak merata, inflasi, dan tingkat pengangguran. Selain itu, akses terbatas terhadap fasilitas dan layanan juga berkontribusi pada kesenjangan ekonomi di wilayah tersebut (Hartati, 2022). Sedangkan angka *gini ratio* terendah yaitu Provinsi Maluku Utara pada tahun 2021-2023 dengan nilai rata-rata sebesar 0,29 selisih 0,01 poin dengan Provinsi Maluku dengan rata-rata 0,30. Rendahnya angka *gini ratio* di Provinsi Maluku Utara dan Provinsi Maluku dipengaruhi oleh beberapa faktor, seperti distribusi pendapatan yang lebih merata, pertumbuhan ekonomi yang inklusif, serta kebijakan pemerintah yang mendukung pemerataan kesejahteraan. Selain itu, akses yang lebih baik terhadap pendidikan dan layanan dasar juga berkontribusi pada pengurangan ketimpangan (BPS, 2024).

Berdasarkan gambar 1.4 provinsi-provinsi di Pulau Maluku dan Papua memiliki ketimpangan yang beragam. Pada tahun 2023 provinsi-provinsi di Pulau Maluku dan Papua masuk ke dalam kategori tingkat ketimpangan rendah, karena angkanya di bawah 0,4. Semakin tinggi ketimpangan maka kesejahteraan masyarakat akan menurun.

Faktor terakhir yang dapat menghambat peningkatan IPG ialah Kemiskinan. Ketimpangan pendapatan sangat erat dengan kemiskinan. Kesenjangan antara kaya dan miskin merupakan salah faktor kemiskinan. Kemiskinan dapat berdampak buruk pada perkembangan sumber daya manusia, yang dapat dilihat dari umur yang lebih rendah. Selanjutnya, kemiskinan akan menyebabkan kemampuan daya beli masyarakat menurun, yang akan mengabaikan kebutuhan lain seperti pendidikan dan kesehatan (Zakaria, 2018). Semakin tinggi angka kemiskinan maka akan

memengaruhi pendapatan masyarakat, sehingga mengurangi kemampuan yang dimiliki. Berikut data perkembangan Kemiskinan Provinsi di Pulau Maluku dan Papua tahun 2021-2023.



Sumber: Badan Pusat Statistik (diolah), 2025

**Gambar 1.5 Kemiskinan Provinsi di Pulau Maluku & Papua  
Tahun 2021-2023 (Ribu Jiwa)**

Pada gambar 1.5 di atas Provinsi Papua merupakan provinsi dengan jumlah penduduk miskin tertinggi selama periode 2021-2023 dengan rata-rata sebesar 919,24 ribu jiwa. Tingginya angka kemiskinan di Provinsi Papua dipengaruhi oleh beberapa faktor, termasuk rendahnya tingkat pendidikan, minimnya infrastruktur, dan ketidakmerataan pembangunan. Selain itu, faktor ekonomi seperti pengangguran dan akses terbatas terhadap sumber daya juga berkontribusi pada masalah ini (Syahrazad & Vidriza, 2024). Meskipun Provinsi Papua Barat berada di pulau yang sama dengan Provinsi Papua, namun jumlah penduduk miskin di Provinsi Papua Barat lebih sedikit dengan rata-rata 217,61 ribu jiwa. Papua Barat menunjukkan pertumbuhan ekonomi yang lebih baik, tingkat pendidikan yang lebih

tinggi, dan pengelolaan program sosial yang relatif lebih efektif, sehingga jumlah penduduk miskinnya lebih kecil.

Sedangkan Provinsi Maluku Utara merupakan provinsi dengan jumlah penduduk miskin terendah selama periode 2021-2023 dengan rata-rata sebesar 83,61 ribu jiwa selisih 221,05 dengan Provinsi Maluku dengan rata-rata 304,66 ribu jiwa. Rendahnya angka kemiskinan di Provinsi Maluku Utara dipengaruhi oleh beberapa faktor positif, seperti pertumbuhan ekonomi yang stabil, peningkatan akses pendidikan, dan program bantuan sosial yang efektif. Selain itu, adanya kesempatan kerja yang lebih baik dan pengembangan infrastruktur juga berkontribusi pada penurunan angka kemiskinan.

Berdasarkan fenomena dan belum banyaknya penelitian yang meneliti variabel di atas yaitu *Gini Ratio* dan lokasi penelitian yang digunakan. Maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian di 4 provinsi di Pulau Maluku dan Papua yaitu Provinsi Maluku, Maluku Utara, Papua Barat, dan Papua untuk mendapatkan gambaran mengenai hubungan antara variabel independen yaitu tingkat pengangguran terbuka, *gini ratio*, kemiskinan dan variabel dependen yaitu indeks pembangunan gender dengan judul penelitian “Pengaruh Tingkat Pengangguran Terbuka, *Gini Ratio*, dan Kemiskinan Terhadap Indeks Pembangunan Gender pada Provinsi di Pulau Maluku & Papua Tahun 2014-2023”.

## **1.2 Identifikasi Masalah**

Berdasarkan latar belakang di atas, maka masalah yang akan dikaji dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pengaruh tingkat pengangguran terbuka, *gini ratio*, dan kemiskinan secara parsial terhadap indeks pembangunan gender pada provinsi di Pulau Maluku dan Papua tahun 2014-2023?
2. Bagaimana pengaruh tingkat pengangguran terbuka, *gini ratio*, dan kemiskinan secara bersama-sama terhadap indeks pembangunan gender pada provinsi di Pulau Maluku dan Papua tahun 2014-2023?

### **1.3 Tujuan Penelitian**

1. Untuk mengetahui pengaruh tingkat pengangguran terbuka, *gini ratio*, dan kemiskinan secara parsial terhadap indeks pembangunan gender pada provinsi di Pulau Maluku dan Papua tahun 2014-2023.
2. Untuk mengetahui pengaruh tingkat pengangguran terbuka, *gini ratio*, dan kemiskinan secara bersama-sama terhadap indeks pembangunan gender pada provinsi di Pulau Maluku dan Papua tahun 2014-2023.

### **1.4 Kegunaan Penelitian**

#### **1.4.1 Kegunaan Pengembangan Ilmu**

Dalam penelitian ini, kebaruan atau pengembangan yang dihadirkan terletak pada penggunaan variabel X2, yaitu ketimpangan pendapatan menggunakan indikator *gini ratio*. Kemudian, kebaruan lainnya adalah lokasi penelitian yang difokuskan pada wilayah Pulau Maluku dan Papua. Dengan adanya pengembangan ini, diharapkan penelitian ini dapat memberikan kontribusi sebagai referensi bagi studi-studi terkait kesempatan kerja di masa mendatang.

### **1.4.2 Kegunaan Teoritis**

#### **1. Manfaat Teoritis**

Diharapkan dapat memberikan wawasan bagi rekan mahasiswa dan pengembangan ilmu pengetahuan mengenai indeks pembangunan gender dan faktor-faktor yang memengaruhinya.

#### **2. Manfaat Praktis**

##### **a. Bagi Peneliti**

Kegunaan penelitian ini bagi penulis adalah sebagai sarana untuk menambah wawasan, pengetahuan, dan pemahaman mendalam mengenai faktor-faktor yang memengaruhi indeks pembangunan gender di wilayah Maluku dan Papua. Selain itu, penelitian ini juga membantu penulis mengasah keterampilan analisis data dan penerapan metode penelitian, yang berguna dalam pengembangan kemampuan akademik di masa depan.

##### **b. Bagi pemerintah**

Sebagai salah satu rujukan bahan pertimbangan bagi pemerintah dalam merancang kebijakan terkait indeks pembangunan gender dalam rangka meningkatkan kualitas pembangunan manusia berbasis gender di Pulau Maluku dan Papua.

### **1.5 Lokasi Penelitian dan Jadwal Penelitian**

#### **1.5.1 Lokasi Penelitian**

Lokasi penelitian ini dilakukan dengan lingkup Pulau yaitu Pulau Maluku dan Papua. Peneliti melakukan penelitian dengan data sekunder yaitu publikasi laporan

